

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN MEDIA #2019GANTIPRESIDEN

Resita Dina Artiningtyas^{1*}, Siwi Nur Islami, Sri Budi Utami, Sri Waljinah

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: resita1204@gmail.com

Abstrak

Keywords:
Berita, Media,
Presuposisi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis #2019GANTIPRESIDEN dengan menggunakan analisis presuposisi. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana metode ini akan mengkaji maksud dan tujuan dari pemberitaan #2019GANTIPRESIDEN. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data sejak awal selama peneliti penelitian. Data dikumpulkan dan diolah secara sistematis. Dimulai dari mencari berita, menganalisis dan menyimpulkan data. Penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Pertama kali peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti menganalisis dan mencari maksud serta makna dari data yang dikumpulkan, hipotesis, dan menyimpulkan dari keseluruhan data yang dikumpulkan. Di dalam kehidupan sehari-hari berita mengenai #2019GANTIPRESIDEN menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat karena ada maksud tertentu dibalik munculnya #2019GANTIPRESIDEN. Maksud tersebut ialah masyarakat berkeinginan di tahun 2019 ini presiden diganti. Kemudian, tagar tersebut banyak diliput oleh media massa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis presuposisi yang terkandung dalam pemberitaan media #2019GANTIPRESIDEN.

1. PENDAHULUAN

Politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*) di sisi lain peristiwa politik, tingkah laku dan pernyataan para aktor politik, sekalipun bersifat rutin, selalu mempunyai nilai berita sehingga sering diliput oleh media massa. Peliputan politik juga cenderung lebih rumit ketimbang reportase bidang kehidupan lainnya. Pada satu pihak, liputan politik memiliki dimensi pembentukan pendapat umum (*public opinion*), baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh para wartawan. Karenanya, berita politik bisa lebih dari sekadar reportase peristiwa politik, tetapi merupakan hasil konstruksi realitas politik untuk kepentingan opini publik tertentu. Dalam mengkonstruksi realitas, media memanfaatkan 3 komponen: (1) pemakaian simbol-simbol politik (*language of*

politic), (2) strategi pengemasan pesan (*framing strategies*) dan (3) kesediaan media memberi tempat (*agenda setting function*) ketiganya itulah yang menentukan opini yang terbentuk.

Sebuah media juga tidak mustahil jika memiliki ideologi, sikap politik, dan kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, dimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap penggunaan simbol politik, pengemasan pesan, dan pemberian tempat mengenai kekuatan politik tersebut. Di pihak lain, kegiatan dalam bidang media massa dewasa ini termasuk di Indonesia telah menjadi industri. Dengan masuknya unsur kapital, media mau tidak mau harus memikirkan pasar demi keberlangsungan hidup mereka bahkan demi keuntungan baik dari penjualan maupun iklan. Tak terkecuali

dalam menyajikan peristiwa politik, faktor modal ini berpengaruh terhadap pengkonstruksian realitas politik.

Media massa memiliki peranan penting dalam konteks demokrasi. Oleh pemerintah media massa digunakan sebagai sarana check and balance, tidak hanya menjadi sarana informasi dan komunikasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Media massa ini digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terlebih dengan terbukanya kran otonomi daerah, media masa di setiap daerah juga semakin berkembang pesat. pemerintah juga menggunakan media massa sebagai wadah sosialisasi tidak hanya sebagai kontrol. Dengan demikian, adanya media massa saat ini menjadi sangat penting bahkan ada yang menyatakan bahwa media massa sebagai pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi.

Media massa berperan sebagai kontrol sosial, yaitu dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (*social control*), sehingga dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi. pada konteks ini, media massa melakukan kritik dan penilaian pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan penguasa. Kontrol tersebut tidak hanya dilakukan untuk pihak-pihak seperti penguasa, pemerintahan, parlemen, pengadilan, atau militer namun juga untuk berbagai hal dalam masyarakat tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kumpulan berita. Waktu, tempat dan jenis kegiatan penelitian ini dilakukan secara fleksibel. Penelitian dan penyusunan laporan dilaksanakan selama 1 Bulan. Subjek dalam penelitian ini adalah kumpulan berita-berita. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena yang dikaji maksud dan tujuan pemberitaan #2019GANTIPRESIDEN serta peneliti harus menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai berita tersebut. Desain yang digunakan peneliti yaitu dengan mengumpulkan segala informasi sebanyak-banyaknya dari media massa

maupun online terkait dengan informasi yang di teliti. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data sejak awal selama peneliti penelitian. Data dikumpulkan dan diolah secara sistematis. Dimulai dari mencari berita, menganalisis dan menyimpulkan data. Penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Pertama kali peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti menganalisis dan mencari maksud serta makna dari data yang dikumpulkan, hipotesis, dan menyimpulkan dari keseluruhan data yang dikumpulkan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kumpulan berita #2019GANTIPRESIDEN.

Menurut Yule (2010:43) presuposisi atau praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan Tuturan dibentuk oleh penutur berdasarkan pengetahuan dari si penutur terhadap mitra tutur. Artinya sebelum penutur menyampaikan sebuah tuturan kepada pendengar atau mitra tutur, penutur sudah mengetahui bahwa mitra tutur memiliki pengalaman atau informasi yang sama dengan penutur.

Menurut Rustono (2012) presuposisi (praanggapan) adalah pengetahuan bersama antara penutur dan mitra tutur yang tidak dituturkan dan merupakan prasyarat yang memungkinkan suatu tuturan benar atau tidak benar. Diartikan bahwa suatu tuturan memiliki makna anggapan yang tersurat.

Menurut Mahnun (2012) menyatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti “perantara” atau “pengantar”. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau orang yang menerima pesan tersebut.

Menurut Mustafa dan Azizah Hamzah (2010) beberapa tahun belakangan ini, media sosial dilihat bercantum menjadi satu jenis platform, yaitu jaringan sosial. Sebelumnya laman jaringan sosial sering dirujuk dengan konteks teknologi 2.0 yang lebih luas. Terkadang, banyak orang menggunakan definisi “media sosial dengan “jaringan sosial” secara sinonim.

Menurut Nasrullah (2014) pada dasarnya teknologi berperan dalam terciptanya

keberagaman media. Pergeseran dari tersedianya media pada waktu lalu dapat dibilang langka dengan akses yang terbatas hingga menuju media yang melimpah. Dalam sisi industri biaya untuk produksi media dan tentu saja alat produksi yang lebih murah serta lebih canggih menjadi alasan munculnya media secara massa. Media cetak, kini tidak lagi sebagai barang langka dan dapat kita jumpai di setiap tempat terutama di negara Indonesia. Atau, media komunikasi contohnya telepon genggam (handphone) kini menjadi kebutuhan mendasar untuk setiap orang agar dapat melakukan koneksi komunikasi jarak jauh, dibanding dengan surat pos ataupun telegram yang perlu waktu cukup lama dibanding dengan telepon genggam (handphone). Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan industri media agar dapat memproduksi media yang semakin beragam, setidaknya kondisi seperti inilah dapat terlihat dari konvergensi media yang tidak hanya berada di dalam bentuk cetak semata, namun juga, masyarakat dapat menemukan media yang sama dalam bentuk elektronik. Artinya, media kini tidak hanya banyak dari sisi jumlah, namun juga khalayak diberikan pilihan untuk mengkonsumsi melalui jenis medianya mulai dari cetak, audio, visual, audio visual, hingga online.

Proses penyampaian pesan melalui media pun mengalami pergeseran penting jika sampai saat ini media sebagai pusat informasi, dan informasi itu di publikasikan dengan satu arah, sekarang media menjadi semakin interaktif. Masyarakat tidak hanya sekadar objek yang terpapar oleh informasi, namun masyarakat telah dilibatkan langsung hingga lebih aktif karena teknologi menyebabkan interaksi di media bisa terjadi.

Alfaqi, Mifdal Zusron (2015:112) berpendapat bahwa politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia atau polis yang berarti kota atau negara. Politik (politics) adalah kegiatan melaksanakan tujuan-tujuan politik dari suatu sistem politik (atau nagara) yang berkaitan dengan proses yang menentukan tujuan dari sistem itu sendiri.

Menurut Prasetya (2011:30) pasca reformasi gairah perpolitikan di Indonesia mulai berkembang lagi, partai politik yang dulu tidak berdaya ketika berhadapan dengan

penguasa saat ini mulai tampak kekuatannya sebagai pengontrol jalannya kesuksesan. Dulu nya fenomena ini pernah muncul pada awal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah negara untuk melawan penindasan kolonial. Euforia kebebasan berpolitik pada saat itu digambarkan oleh munculnya partai politik dengan segala identitasnya. Tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa pemilu pertama adalah pemilu yang paling demokratis, dengan banyaknya peserta pemilu dan asas jurdil yang relatif bisa dipertanggung jawabkan karena penguasa belum mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi jalannya pesta demokrasi dan hal seperti ini untuk saat ini menjadi persoalan tersendiri dimana penguasa masih dapat mempengaruhi proses pemilu, baik melalui mobilisasi pemilih untuk memilih partai penguasa, politik uang, permainan data pemilih dan juga permainan dari penyelenggara pemilu sendiri dalam memenangkan kandidat (pemilu legislatif tertentu).

Menurut Haryanto (2015:47) perintah membaca merupakan perintah Allah SWT yang paling awal bagi Nabi Muhammad SAW, “Iqro bismi rabbika al-ladzikhalaq (bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan)” (QS. Al-Alaq:1) yang berarti juga menjadikan kewajiban umat islam. Perintah membaca ini tentu memiliki makna yang sangat luas, intinya yaitu menyerap informasi. Peri kehidupan, perilaku, sikap dan kecenderungan manusia pada akhirnya ditentukan oleh informasi yang sampai kepadanya. Informasi tersebar tak lepas dari peran pers, jurnalis dan media massa.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu politik, karenanya “membaca” politik menjadi penting untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan, tuntutan dan kewajiban politik dalam hidupnya. Sumber-sumber yang menginformasikan mengenai realitas politik ialah media massa melalui pemberitaan politik. Media massa dalam masyarakat dihadirkan oleh masyarakat sendiri agar saling membagi informasi, mengartikulasikan ide-ide, dan bahkan mencerminkan keadaan diri mereka sendiri termasuk dalam bidang politik. Media massa memiliki fungsi yang strategis

dalam memasok informasi politik bagi masyarakat. Dari berbagai aktivitas pers dan jurnalistik melalui media massa dirumuskan empat fungsi dan tanggung jawab pers, yaitu informasi, edukasi, entertainment dan kontrol sosial. Kontrol sosial dalam perspektif politik, maksudnya ialah untuk mengawasi perilaku sosial dan politik masyarakat terutama pihak kekuasaan, transparansi akuntabilitas publik bagi para pejabat dan media bagi pendapat rakyat. Itulah alasan mengapa pers termasuk salah satu dari empat pilar demokrasi: eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.

Media massa tidak tumbuh dari ruang kosong, melainkan hadir dalam konteks sosial, politik dan budaya masyarakat hingga pada akhirnya kini media massa sebagai wadah pertarungan wacana politik melalui pemberitaan politik. Pemberitaan politik tersebut penuh dengan tarikan-tarikan kepentingan tiap pihak. Akhirnya muncul keluhan dari publik mengenai media massa yang bertindak tidak obyektif, sepihak, menimbulkan bias dan sebagainya yang ditetapkan dalam kode etik jurnalistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini tentang tersebarnya berita #2019GANTIPRESIDEN. Pada hakikatnya memiliki banyak aspek yang dapat diteliti, seperti analisis wacana, kesalahan berbahasa, dan sebagainya. Akan tetapi penelitian hanya menganalisis tentang tagar yang disebarluaskan mengikuti #2019GANTIPRESIDEN.
Data 1

Mahfud MD: Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Tak Melanggar Hukum. Menanggapi itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menganggap bahwa gerakan tagar #2019GantiPresiden bukan gerakan melanggar hukum. Jakarta - Perang tanda pagar (tagar) atau hashtag di media sosial terus terjadi, yakni #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Tidak sedikit dua pendukung calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan tagar itu untuk menyampaikan sikap politiknya. Menanggapi itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menganggap bahwa tagar #2019GantiPresiden bukan gerakan yang melanggar hukum. "2019 ganti presiden itu melanggar hukum enggak?

enggak, kenapa dibilang enggak melanggar? enggak apa apa, saya bukan pengikut tapi saya enggak setuju kalau itu dikatakan melanggar hukum," kata Mahfud dalam diskusi Membangun Indonesia Beradab, di Kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018). Selain itu, Mahfud juga menyebut gerakan tagar 2019 ganti presiden, gerakan yang lumrah dan tidak masuk dalam kategori makar. "Coba ada yang dengan nekat mengatakan itu makar. di mana makarnya, enggak ada makar.

Dia (tagar 2019 ganti presiden) tidak menyandera presiden, dia juga tidak mengatakan mau mengganti Pancasila. Tapi kan dia mau ikut pemilu. "Di mana makarnya," ujarnya. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menjelaskan makar dalam istilah hukum itu ada di kudeta. Kudeta dilakukan oleh militer atau kalau oleh kekuatan sipil. Di dalam pasal 104 sampai 129 kitab UU pidana, maka 1 merampas kemerdekaan Presiden sampai dia gabisa kerja, dikurung, ditahan, itu makar namanya. dua, berkomplot merampas kemerdekaan presiden dan wapres, ketiga mengganti ideologi Pancasila. itu menurut KUHP," jelasnya.

Dia juga berpesan kepada masyarakat Indonesia agar lebih memahami hukum serta berhukum secara benar dan berkeadaban. "Saya bukan pengikutnya tetapi kita harus berhukum dengan benar kalau mau berkeadaban, restoratif justice juga. Perbedaan jangan dibenturkan melawan hukum, enggak boleh. Kita itu menjadikan hukum sebagai harmoni membangun harmoni," pungkasnya.

Penggunaan tagar dalam berita tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa tagar #2019gantipresiden bukan gerakan yang melanggar hukum, karena ini termasuk dalam gerakan yang lumrah dan tidak termasuk dalam kategori makar. Maksud lain dari tagar #2019GantiPresiden ialah sebagai aspirasi masyarakat yang menginginkan presiden di Indonesia diganti. Lalu, mereka mencetuskan gerakan tagar tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa penggunaan tagar #2019GantiPresiden hanya sebagai aspirasi masyarakat yang menginginkan ganti pemimpin negara.

Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Tak Melanggar Hukum yang dikemukakan oleh

Mahfud MD terjadi hubungan antara penutur dan mitra tutur yang dapat dipahami maksud penutur. Bahwa anggapan penutur dalam pemberitaan tersebut penggunaan #2019GantiPresiden tidak melanggar hukum atau makar karena, itu hanya pendapat penutur yang kemudian viral di kalangan masyarakat. Masyarakat bebas berpendapat namun tetap memperhatikan etika.

Data 2

Tanggapan KH Ma'ruf Amin Saat Ditanya #2019GantiPresiden, Masih Berpolemik. Banjarmasinpost.co.id Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, bakal Cawapres di Pilpres 2019 KH Ma'ruf Amin langsung melakukan berbagai aktivitas. Berbagai dinamika politik terjadi selama KH Ma'ruf Amin berhaji. Termasuk gerakan #2019GantiPresiden yang diinisiasi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera. Ditanya hal itu, bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin enggan mengomentari soal polemik #2019GantiPresiden. Menurut Ma'ruf, nanti ada pihak yang akan menanggapi polemik #2019GantiPresiden. "Itu nanti ada yang menanggapi lah. Yang menanggapi itu siapa ya kita artinya..." ucap Ma'ruf di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018). Gerakan #2019GantiPresiden sedang ramai jadi perbincangan publik. Terutama setelah, sejumlah massa menolak kedatangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, Riau, Sabtu pekan lalu. Massa mengepung bandara dan memaksa Neno kembali ke Jakarta.

Sementara itu, massa aksi #2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan pihak yang kontra di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Sementara itu, Komisioner Pemilihan Umum Wahyu Setiawan berujung gerakan #2019GantiPresiden tidak termasuk kampanye. Gerakan itu dinilai ekspresi politik masyarakat menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Sementara Tenaga Ahli Utama Kedepatian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, menyebut aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden adalah makar.

Penggunaan tagar #2019GantiPresiden dalam berita tersebut dimaksudkan untuk berkampanye dalam Pilpres 2019. Akan

tetapi, gerakan ini juga dimaksudkan agar banyak masyarakat yang terpengaruh dengan munculnya tagar #2019GantiPresiden, sehingga masyarakat pun akan ikut menyebarluaskan gerakan tagar ini. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat berkeinginan agar pemimpin negara di tahun 2019 ini diganti.

Gerakan #2019GantiPresiden, Masih Berpolemik yang dikemukakan oleh KH Ma'ruf Amin maksudnya pemberitaan tersebut masih diperdebatkan di beberapa media massa. Sebab bertepatan dengan pemilihan presiden di tahun 2019 ini. Banyak masyarakat yang kurang bersimpati dengan kepemimpinan Jokowi lima tahun lalu.

Data 3

Besok Deklarasi #2019GantiPresiden, Apa Kata Anies Baswedan?

Suara.com - Sekelompok orang akan mendeklarasikan sebuah gerakan bernama #2019 Ganti Presiden di kawasan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018), menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kegiatan itu jauh dari tujuan politik. Kelompok #2019GantiPresiden yang diduga mengintimidasi sejumlah orang dari pendukung Joko Widodo, pekan lalu itu, sudah dilaporkan ke polisi. "CFD harus tetap menjadi kawasan yang bebas dari kegiatan politik sesuai dengan aturan," kata Anies saat ditemui di Grand Hotel Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Gerakan aksi deklarasi akbar melawan nasional #2019GantiPresiden itu diinisiasi politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Aksi tersebut akan digelar pada Minggu (6/5/2018) di seputar Patung Kuda Arjuna Wiwaha pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, aksi perundungan terjadi di arena CFD, tepatnya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pekan lalu. Tindakan tak menyenangkan yang diduga dilakukan kelompok berkaus #2019GantiPresiden dialami seorang perempuan bernama Susi Ferawati.

Aksi perundungan itu terjadi ketika Susi dan anaknya mengikuti aksi jalan sehat yang diadakan melawan Joko Widodo berkaus

#DiaSibukKerja. Akibat tindakan intimidasi itu, ia kemudian melapor ke Polda Metro Jaya. Aksi itu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Bahkan Korda BEM Nasionalis Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (4/5/2018) mendesak Anies ketat dalam memberi izin kegiatan tersebut di acara di car free day.

Massa yang kompak mengenakan baju bertuliskan “Stop Politisasi Car Free Day”, menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketat menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. “Kami mendesak gubernur untuk menegakkan pergub itu. Seharusnya CFD menjadi wadah warga berolahraga dan berekspresi tanpa polusi udara. Setop politisasi car free day,” ujar Koordinator aksi Tukul Widiyatmo dalam orasinya. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan kegiatan CFD, untuk menggunakan kepentingan politik jelang pemilu 2019. Penggunaan tagar dalam berita tersebut bahwa terdapat sekelompok masyarakat yang menggunakan tagar ini untuk keperluan politik dan mengintimidasi sejumlah orang dari pendukung Joko Widodo. Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa jangan ada masyarakat yang menggunakan gerakan tagar #2019GantiPresiden ini untuk berpolitik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2018) yang berjudul “Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu” menjelaskan tentang gerakan #2019GantiPresiden yang ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar ini dihubungkan dengan black campaign. Gerakan ini pertama kali dicetuskan oleh PKS Mardani Sera bulan lalu. Banyak kelompok yang membentuk dan mendeklarasikan gerakan ini. Awalnya, Mardani menggunakan gelang berlogo #2019GantiPresiden dalam acara televisi pada hari Selasa, 3 april 2018. Setelah acara TV itu selesai #2019GantiPresiden ini pun langsung ramai di media sosial dan banyak mendapatkan dukungan. Penelitian ini tentang #2019GantiPresiden berhubungan dengan penelitian kami karena sama-sama meneliti tagar atau hastag #2019GantiPresiden.

Deklarasi #2019GantiPresiden yang dikemukakan oleh Anies baswedan bermaksud mempertegas peraturan yang ada di CFD termasuk peraturan untuk tidak berlebihan dalam berdemokrasi. Sebab CFD harus bersih dari politik sehingga masyarakat akan lebih menikmati acara yang disuguhkan di CFD. Dengan demikian penutur yang menyampaikan pendapat atau gagasannya harus lebih bisa menempatkan di mana ia harus berpolitik atau berdemokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan yang berjudul “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi” menjelaskan tentang tahun 2017 pilkada DKI Jakarta diwarnai dengan politisasi Agama, Bnyak pihak-pihak yang berpotensi untuk menebarkan isu agama dan etnisitas di tahun 2018-2019. Gejala yang menjadi perhatian publik adalah gerakan #2019GantiPresiden yang merupakan sikap kritis dan manifestasi pada pemerintahan Joko Widodo yang kurang memuaskan. Hal menarik dari fenomena ini ialah proses sarat dengan politisasi agama. Tahun 2018-2019 ialah tahun politik untuk Indonesia. Tahun itu digunakan oleh media massa untuk mempopulerkan tentang politik. Dikatakan tahun politik karena waktu dua tahun itu merupakan pesta demokrasi bagi Indonesia yakni pemilihan Kepala daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2019-2024. Penelitian ini tentang #2019GantiPresiden berhubungan dengan penelitian kami karena sama-sama meneliti tagar atau hastag #2019GantiPresiden.

Data 4

Zuhairi Misrawi: #2019GantiPresiden Gerakan Emosional.

Jakarta- Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Zuhairi Misrawi menilai penggunaan #2019gantipresiden yang marak di media sosial tidak mendidik masyarakat. Zuhairi menggaris bawahi penggunaan istilah presiden dalam tagar tersebut. Ia menilai, penggunaan istilah presiden tidak lazim. Menurutnya, pesta demokrasi tahun 2019 nanti tidak mengganti presiden sebagai lembaga kenegaraan. Melainkan hanya

mengganti orang yang akan menduduki jabatan tersebut.

“Presidennya adalah presiden yang dipilih rakyat. Istilah yang dipakai tidak mendidik dan munculnya banyak tafsir, “ kata Zuhairi dalam diskusi bertajuk Polemik Tagar di Cikini, Jakarta, Rabu (12/09/2018).

Zuhairi mengatakan, gerakan #2019gantipresiden selama ini tidak dilakukan di level online. Tetapi juga jadi gerakan riil di tengah masyarakat. Buntutnya, timbul konflik di tengah masyarakat.

Zuhairi menilai, konflik bisa muncul lantaran gerakan #2019gantipresiden kerap menggunakan bahasa-bahasa yang menjauhkan penggunaannya dari adu argumen dan gagasan. Karenanya, gerakan ini hanya akan menjadi gerakan emosional dan mengarah pada polarisasi dan fragmentasi di tengah masyarakat.

“Ini berbahaya dalam konteks demokrasi karena menyediakan ruang kita berbeda, tetapi ketika masuk pusaran konflik, ini akan menjadi bola liar bagi demokrasi dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” kata Zuhairi.

Penggunaan #2019gantipresiden dalam berita tersebut menurut penutur itu merupakan hal yang diharamkan, karena dengan adanya #2019gantipresiden membuat masyarakat tidak terdidik. Justru akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat bahkan dapat menimbulkan perpecahan. Sebab dengan beredarnya tagar tersebut masyarakat akan menilai adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Karena penutur beranggapan dengan beredarnya #2019gantipresiden merupakan hal yang haram karena akan meganggu hubungan antara satu dengan yang lainnya.

4. KESIMPULAN

Simpulan hasil penelitian ini sebagai berikut media berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti “perantara” atau “pengantar”. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau orang yang menerima pesan tersebut. Politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* atau *polis* yang berarti kota atau negara. Politik (*politics*) adalah kegiatan melaksanakan

tujuan-tujuan politik dari suatu sistem politik (atau nagara) yang berkaitan dengan proses yang menentukan tujuan dari sistem itu sendiri. Serta tagar #2019GantiPresiden hanya sebagai aspirasi masyarakat yang menginginkan ganti pemimpin negara dan penggunaan tagar #2019GantiPresiden ini untuk berkampanye dan berpolitik dalam Pilpres 2019. Presuposisi atau praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan Tuturan dibentuk oleh penutur berdasarkan pengetahuan dari si penutur terhadap mitra tutur. Artinya sebelum penutur menyampaikan sebuah tuturan kepada pendengar atau mitra tutur, penutur sudah mengetahui bahwa mitra tutur memiliki pengalaman atau informasi yang sama dengan penutur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, Mifdal Zusron. 2015. “*Memahami Indonesia melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas*”. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 28, No. 2, Agustus, Hal. 111-116.
- Fitri, Sherly Nelsa. 2018. “*Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu*”. Jurnal UNNES, Vol.4, No.2, Hal. 284-303.
- Haryanto, Joko Tri. 2015. “*Etika Islam tentang Pemberitaan Politik di Indonesia*”. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 6, No. 1, Juni, Hal. 47-70.
- Kurniawan, Budi. 2018. “*Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi*”. Jurnal Sosiologi Agama, Vol.12, No.1, Januari-Juni, Hal 133-154.
- Mahnun, Nunu. 2012. “*Media Pembelajaran (Kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran)*”. Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37, No. 1, Januari-Juni, Hal. 27-35.

- Mustafa, Siti Ezaleila dan Azizah Hamzah. 2010. *“Media Baru yang Baru: Trend Penggunaan Jaringan Sosial dalam Kalangan Pengguna di Malaysia”*. Jurnal Pengajaran Media Malaysia, Vol. 13, No. 2, Hal. 93-110.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetya, Imam Yudhi. 2011. *“Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik”*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 1, Hal. 30-40.
- Rustono. 2012. *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Yule, George. 2010. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.